

LOKAKARYA  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT LPM IPB  
DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGLATAN DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KERJASAMA  
BOGOR, 13-14 JANUARI 1993

LOK-PPM.I

TELAAHAN STRATEGIS PEMBANGUNAN  
DI JAWA BARAT DAN PROSPEK KERJASAMA  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT DENGAN  
PERGURUAN TINGGI PADA PJPT II

Oleh :

BAPPEDA PROPINSI DT I JAWA BARAT



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1993

## BAB I P E N D A H U L U A N

Penelaahan terhadap sesuatu yang telah dilaksanakan adalah suatu hal yang perlu dilakukan agar diperoleh hasil yang lebih sempurna di waktu yang akan datang.

Demikian juga dengan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan lebih dari 2 dasawarsa ini. Telaahan terhadap pelaksanaannya perlu dilakukan agar hasil telaahan tersebut dapat dijadikan masukan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Perlu diketahui bahwa pentingnya Perguruan Tinggi adalah untuk meningkatkan kelembagaan khususnya dan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia umumnya, dimana kita dapat memperoleh penilaian yang obyektif dengan selalu menggunakan metoda-metoda yang ilmiah, sehingga dapat dengan mudah mengemukakan pendapat secara obyektif.

Propinsi Jawa Barat yang letaknya sangat strategis, dimana terdapat banyak Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 10 buah maupun Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 75 buah dan merupakan Gudang ahli-ahli Peneliti, Doktor maupun Profesor serta dilengkapi dengan 90 Lembaga Penelitian adalah merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mempesoleh kerjasama dalam bidang-bidang penelitian.

Untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia maka sedikitnya tiga hal perlu dilakukan, yaitu :

1. Menciptakan lingkungan yang menghasilkan tumbuhnya para penemu (inventor dan inovator) yang menjadi penggerak pembangunan.

2. Sistem Pendidikan yang berorientasi ke pasar.
3. Kebijakan upah untuk mengarahkan minat pada pendidikan yang dibutuhkan.

Dimasa yang akan datang IPTEK akan menjadi kunci pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, oleh sebab itu perlu diciptakan iklim yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya IPTEK, yaitu iklim dan lingkungan yang lebih terbuka, dinamis dan kreatif.

Dalam hubungannya dengan yang dikemukakan di atas, dengan ini makalah yang akan disajikan diberi judul : **Telaahan Strategis Pembangunan Jawa Barat dan Prospek Kerjasama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dengan perguruan Tinggi pada PJPT II.**

BAB II  
TELAAHAN STRATEGIS PEMBANGUNAN JAWA BARAT

A. Kesejahteraan Ekonomi.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Sejak Pelita II sampai dengan Pelita V tahun kedua, LPE Jawa Barat mencapai rata-rata per tahun sebesar 7,89.%. Suatu LPE yang relatif pesat dibandingkan dengan LPE Nasional maupun beberapa Propinsi lain di Indonesia.

Selama Pelita II dan III, naik masing-masing 8,55 % dan 8,40 %, turun pada periode Pelita IV menjadi 6,07 % dan selama dua tahun Pelita V naik lagi mencapai 8,55 % rata-rata pertahunnya. LPE yang cukup pesat pada periode Pelita II dan III terutama disebabkan oleh masuknya PMA dan PMDN ke Jawa Barat yang cukup besar yaitu lebih dari 30 % dari PMA/PMDN Nasional diinvestasikan di Jawa Barat.

Sedangkan LPE yang menurun pada periode Pelita IV disebabkan karena pengaruh resesi dunia pada tahun 1980-an yang baru terasa di Jawa Barat pada periode Pelita IV. Sedangkan 2 tahun Pelita V LPE-nya meningkat lagi karena berbagai upaya yang telah dilakukan Pemda untuk menyehatkan kembali ekonominya akibat resesi mulai menunjukkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat tabel berikut.

### LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

Pelita	II	8,55
Pelita	III	8,40
Pelita	IV	6,07
Pelita	V	8,55
Rata-rata dari awal Pelita II sampai dengan V 7,89 %		

#### 2. Pendapatan per kapita (PDRB Perkapita)

Pendapatan perkapita masyarakat Jawa Barat diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menurut harga berlaku menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Pada akhir Pelita I, tercatat pendapatan perkapita Jawa Barat sebesar . 65 ribu meningkat 14 kali lipat menjadi Rp. 917 ribu pada tahun kedua Pelita V. Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat grafik berikut :

Selama Pelita II pendapatan perkapita telah meningkat hampir 2 kali lipat, Pelita III meningkat 3 kali lipat dan Pelita IV meningkat 2 kali lipat lebih. Apabila peningkatan tersebut dapat dipertahankan maka pada tahun 2.000 pendapatan perkapita Jawa Barat akan menjadi Rp. 1,4 juta.

### 3. Perubahan Struktur Ekonomi

Seperti telah diuraikan, bahwa salah satu tujuan pembangunan ekonomi di Jawa Barat adalah merubah struktur ekonomi masyarakat dari agraris ke struktur ekonomi industri.

Pergeseran struktur ekonomi ini tampak jelas terlihat pada sumbangan/kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Jawa Barat semakin menurun sementara kontribusi **sektor** industri dan sektor lainnya diluar pertanian semakin meningkat.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**STRUKTUR EKONOMI JAWA BARAT PER AKHIR PELITA  
PELITA I, II, 1 1 IV DAN TAHUN KE 2 PELITA V**

NO.	SEKTOR	I 1973	II 1978	III 1983	IV 1988	TH KE II PELITA V 1990 (%)
1.	<b>PERTANIAN</b>	38,83	30,62	26,41	19,77	18,70
2.	INDUSTRI	8,81	10,60	10,04	18,91	20,61
3.	<b>LAIN-LAIN</b>	52,37	58,78	63,55	67,33	60,69

Pada akhir Pelita I peranan sektor Pertanian tercatat sekitar 39% menurun menjadi sekitar 13% pada tahun kedua Pelita V. Sedangkan sektor Industri meningkat dari sekitar 9% menjadi 21%.

Diukur dari klasifikasi PBB maka perekonomian Jawa Barat berada pada masa semi Industri. Menurut PBB suatu negara diklasifikasikan sebagai negara "Belum Berindustri" apabila peranan sektor industrinya terhadap perekonomian kurang dari 10%, apabila antara 10 - 20% diklasifikasikan sebagai Negara "sedang dalam Proses Berindustri" (industrializing) dan 20 - 30% diklasifikasikan sebagai "Semi Industri" dan lebih dari 30% disebut negara "Industri".

#### 4. Distribusi Pendapatan (Pemerataan)

Seperti diketahui saat ini ada tiga alat ukur pembagian pendapatan, yaitu :

- (1) Kriteria Bank Dunia;
- (2) Gini Ratio (Indeks Gini) dan
- (3) Kurva Lorenz.

##### a) Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia untuk melihat pembagian pendapatan, membagi penduduk menjadi tiga kelompok yaitu :

- (a) Kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah;
- (b) Kelompok 40 % penduduk berpendapatan menengah dan
- (c) Kelompok 20 % penduduk berpendapatan tinggi.

Apabila 40 % penduduk berpendapatan rendah hanya menerima kurang dari 12 % dari total pendapatan maka tingkat ketimpangan sebaran pendapatan dinilai tinggi, apabila antara 12 % sampai 17 % dinilai sedang, apabila lebih dari 17 % dinilai tingkat ketimpangan sebaran pendapatan dinilai rendah.

Berdasarkan penelitian Kantor Statistik Jawa Barat kerjasama dengan Bappeda terlihat bahwa pada tahun 1984, 1987 dan 1990 ternyata bahwa 40 % penduduk berpendapatan rendah di Jawa Barat menerima sebesar 23,15 % (1984), 22,33 % (1987) dan sebesar 22,46 % (1990).

Dengan demikian tingkat ketimpangan sebaran pendapatan (pemerataan pendapatan) di Jawa Barat dinilai oleh kriteria Bank Dunia ada pada tingkat rendah atau merata.

Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat tabel berikut :

NO.	KELOMPOK PENDUDUK	1984	1987	1990
1.	40 % (rendah)	23,15	22,33	22,46
2.	40% (menengah)	36,62	37,20	35,61
3.	20 % (tinggi)	40,23	40,47	41,93

#### b) Indeks Gini

Ukuran Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Apabila Indeks Gini mendekati nol menandakan adanya tingkat ketimpangan sebaran yang rendah dan apabila Indeks Gini mendekati satu menunjukkan adanya ketimpangan sebaran yang tinggi.

Berdasarkan penelitian Kantor Statistik dan Bappeda, angka Indeks Gini pada tahun 1984, 1987 dan 1990 masing-masing adalah 0,3029; 0,2989 dan 0,3149.

Dari angka Indeks Gini tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Jawa Barat masih merata.

c) **Kurva Lorenz.**

Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara besarnya persentase penduduk/rumah tangga dengan besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh penduduk/rumah tangga tersebut. Persentase penduduk/rumah tangga dan pendapatan yang diterima diurutkan dari nilai pendapatan terendah hingga tertinggi. Pada kurva ini sebaran pendapatan disebut "merata" apabila 10 persen penduduk/rumah tangga menerima 10 persen total pendapatan, atau 40 persen penduduk/rumah tangga menerima 40 persen dari total pendapatan, dan seterusnya. Dengan kata lain, apabila sebaran pendapatan merata maka besarnya persentase penduduk/rumah tangga akan sama dengan besarnya persentase pendapatan yang diterima. Keadaan seperti ini digambarkan pada Kurva Lorenz sebagai garis diagonal OC dengan sudut 45 derajat. Pada keadaan ini nilai Gini Rasio sama dengan 0 (nol). Sebaliknya apabila sebaran pendapatan tidak merata Kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonal OC. Dengan kata lain, apabila Kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal OC, maka sebaran pendapatan semakin merata.

## 5. Kesempatan Kerja

Selama periode 1971 sampai dengan 1990 kesempatan kerja di Jawa Barat telah meningkat dari 5,7 juta menjadi 12,7 juta. Selama periode tersebut telah terjadi perubahan struktur pekerja. Pada tahun 1971 pekerja di sektor pertanian proporsinya tercatat sekitar 58,4% menurun menjadi 43,84% pada tahun 1990. Sedangkan pekerja di sektor industri telah meningkat proporsinya dari 2,8% menjadi 14,20%.

Dilihat dari proporsi pekerja nampak bahwa pekerja di sektor pertanian masih tetap dominan. Apabila dibandingkan dengan perubahan struktur ekonomi dilihat dari produksinya terlihat bahwa perubahan struktur pekerja jauh lebih lambat. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai hambatan baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat kultural.

Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan struktur pekerja dapat dilihat dari tabel berikut :

% KESEMPATRN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN

NO.	SEKTOR	1971	1980	1990
1.	PERTANIAN	58,40	48,80	43,84
2.	INDUSTRI	2,84	10,70	14,20
3.	LAIN-LAIN	38,76	40,50	41,96
	T O T A L	100,00	100,00	100,00

A la dilihat dari status pekerjaan utama dari para pekerja terlihat adanya kecenderungan pekerja dengan status sebagai buruh dan pekerja keluarga proporsinya makin meningkat. Status pekerja seperti ini pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak berketerampilan.

Pada tahun 1980 pekerja dengan status buruh proporsinya tercatat sebesar 31,5% meningkat menjadi 37,2% pada tahun 1990. Demikian pula halnya dengan pekerja keluarga selama periode yang sama proporsinya meningkat dari 12,4% menjadi 18%.

Untuk lebih jelasnya dipersilahkan melihat tabel berikut :

% PEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA  
DI JAWA BARAT TAHUN 1980 S/D 1990

NO.	JENIS PEKERJAAN	1980 (%)	1990 (%)
		27,94	
1.	BERUSAHA SENDIRI		22,82
2.	BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP	25,21	20,79
3.	BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	2,91	1,18
4.	B U R U H	31,54	37,23
5.	PEKERJA KELUARGA	12,40	17,98
	J U M L A H	100,00	100,00

Walaupun demikian kalau dilihat dari status formal dan informal nampak bahwa pekerja formal cenderung meningkat. Pada tahun 1980 tercatat sekitar 34% pada tahun

1990 meningkat menjadi 38%. Berbeda halnya dengan pekerja informal, selama periode yang sama cenderung menurun, yaitu dari 66% menjadi 62% kecenderungan ini bersifat positif, artinya pekerja yang mendapat perlindungan kerja dan bersifat formal semakin meningkat.

Dari pekerja menurut status pekerjaan. Kelompok pekerja yang dibantu buruh tetap atau dapat disebut sebagai "majikan" mempunyai peran yang cukup strategis, yaitu sebagai "wiraswasta" yang menjadi penggerak/pendorong pembangunan ekonomi selama periode 1980-1990 proporsinya menurun, yaitu dari 2,9% menjadi 1,2% atau menurun dari 244 ribu unit menjadi 150 ribu unit. Kalau dilihat dari pendidikannya maka hanya sekitar 30% yang berpendidikan SMTP ke atas yang potensial untuk memanfaatkan peluang dalam alam globalisasi.

## B. Kesejahteraan Sosial

### 1. Kependudukan

Periode tahun 1961 - 1971 laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat sebesar 2,17% meningkat menjadi 2,69% periode 1971 - 1980 dan periode 1980 - 1990 rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 2,57%.

Hasil Sensus Penduduk tahun 1990, memberikan gambaran tentang semakin membengkaknya jumlah penduduk di Jawa Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata sebesar 2,57 %/tahun selama periode 1980-1990. Di daerah-daerah di mana sektor industri tumbuh dengan pesat maka LPPnya juga tinggi, yaitu di wilayah Jawa Barat utara dan tengah.

Di WP Botabek mencapai persentase peningkatan jumlah penduduk yang tertinggi selama periode 1980-1990, yaitu 5,07 % diikuti oleh WP Banten sebesar 2,56 % dan WP Bandung Raya sebesar 2,09 %, sedangkan WP yang lainnya di bawah 2%.

LPP yang pesat tersebut terutama disebabkan tingginya angka migrasi masuk ke daerah-daerah industri disamping LPP alamiah yang relatif masih tinggi.

LPP Jawa Barat dibandingkan dengan nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)  
Jawa Barat dan Nasional

Tahun	Jawa Barat ( % )	Nasional ( % )
1961 - 1971	2,17	2,10
1971 - 1980	2,69	2,32
1980 - 1990	2,57	1,97

Sumber : BPS dan KS Jawa Barat.

## 2. Kesehatan

Indikator derajat kesehatan masyarakat yang paling peka adalah angka kematian bayi (AKB). Selama satu dekade AKB di Jawa Barat telah mengalami penurunan, yaitu dari 128 perseribu kelahitan hidup (1980) menjadi 89 perseribu kelahiran hidup pada tahun 1990 (Penelitian Kantor Sensus dan Bappeda Jawa Barat, IMH, 1990). Ini berarti bahwa selama periode 1980 - 1990 AKB di Jawa Barat telah menurun sebesar 39 bayi perseribu kelahiran hidup. Penurunan AKB yang relatif tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang satu sama lain saling berkaitan, diantaranya program immunisasi, program

peningkatan peran serta masyarakat, program perbaikan lingkungan, program perbaikan gizi keluarga dan program lainnya. Di samping itu adanya perbaikan taraf sosial ekonomi masyarakat ikut pula mempengaruhi perbaikan AKB sebagai cerminan dari derajat kesehatan masyarakat.

Pada tahun 1990 ini terdapat 14 Dati II yang AKB-nya masih diatas AKB Jawa Barat, yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Serang dan Kotamadya Cirebon.

Masih rendahnya AKB berkaitan antara lain dengan tingkat ketersediaan air bersih, kondisi di dalam rumah dan kesejahteraan Tbu.

Disamping AKB, indikator derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pula dari Angka Harapan Hidup (AHH) berumur 1 tahun.

Selama satu dekade 1980 - 1990, AHH di Jawa Barat menunjukkan kemajuan. Menurut hasil penelitian Kantor Statistik dan Bappeda Jawa Barat tahun 1990 terlihat bahwa AHH di Jawa Barat pada tahun 1980 hanya mencapai 54 tahun meningkat menjadi 60 pada tahun 1990. AHH perempuan selalu lebih baik dari AHH laki-laki, demikian pula AHH di kota lebih baik dari AHH di pedesaan. Ini berarti bahwa makin "ngota" suatu daerah maka angka harapan hidup penduduknya menjadi lebih lama. Hal ini berkaitan dengan fasilitas pelayanan sosial dasar di perkotaan relatif lebih baik dari di pedesaan.

AHH Perempuan yang lebih baik dari laki-laki mungkin disebabkan karena laki-laki bekerja lebih berat dari wanita sehingga AHH-nya lebih pendek.

Dilihat per Dati II nampak bahwa pada tahun 1990 terdapat 11 Dati II yang AHH-nya di bawah AHH Jawa Barat yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Indrsmayu, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Kabupaten Serang.

Walaupun perkembangan AKB dan AHH Jawa Barat selama satu dekade menunjukkan perbaikan namun apabila dibandingkan dengan angka-angka nasional ternyata angka Jawa Barat masih di bawah angka nasional. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tahun	Jawa Barat	Nasional
1980	128	107,9
1990	89	79,2

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun	Jawa Barat	Nasional
1980	54,78	52,45
1990	60,54	58,13

Kenyataan ini berkaitan erat dengan beban pelayanan kesehatan yang relatif lebih berat untuk Jawa Barat dibandingkan dengan Propinsi lainnya. Beberapa faktor tersebut antara lain :

- 1) Jumlah Dati II di Jawa Barat hanya 24 sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 35 dan 37 Dati II. Hal ini berkaitan dengan jumlah sarana dan prasarana pelayanan serta jumlah tenaga medis dan non medis yang kriterianya ditentukan oleh jumlah wilayah/daerah administratif tersebut.
- 2) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari Propinsi lainnya.
- 3, i taan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang terbatas dihadapkan kepada penduduk yang relatif besar berpengaruh terhadap tingkat dan cakupan pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap derajat kesehatan masyarakat.

### 3. G i z i

Berdasarkan hasil pengamatan angka Kekurangan Kalori Protein (KKP) di Jawa Barat adalah 13,9 % pada tahun 1989, masih lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 10,8 %.

Adapun Dati II yang angka KKP-nya diatas angka rata-rata Jawa Barat adalah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Indramayu dan Kodya Cirebon.

Mengenai prosentase kekurancjan Vitamin A di Jawa Barat menurun dari 1,55 % pada tahun 1977 menjadi 0,14 % pada tahun 1985.

Permasalahan yang dihadapi pada program ini antara lain masih rendahnya status gizi Bali t pada beberapa daerah dan masih kurang terampilnya serta belum memadainya jumlah tenacja Kader aktif di setiap Posyandu dan Puskesmas.

#### 4. Pendidikan

Pelaksanaan wajib belajar bagi anak usia 7 - 12 tahun untuk tingkat SD di Jawa Barat sudah hampir mencapai 100 %, artinya anak usia 7 - 12 tahun baik yang normal maupun berkelainan hampir seluruhnya sudah dapat mengikuti pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan dasar, baik di SD, SDLB maupun Madrasah Ibtidaiyah.

Sedangkan jumlah lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang melanjutkan ke SLTP tahun ajaran 1991/1992 di Jawa Barat baru mencapai 57,25 %.

Target tahun 1992/1993 ialah 75 %, sedangkan pencapaiannya sampai dengan tanggal 31 Juli 1992 baru mencapai 67,93 % yang terdiri dari 61,39 % melalui jalur sekolah (SLTP dan Madrasah Tsanawiyah) dan 6,5 % jalur luar sekolah.

Adapun tingkat pencapaian angka melanjutkan dari SD dan Madrasah Tsanawiyah ke SLTP untuk masing-masing Daerah Tingkat II di Jawa Barat bervariasi. Ada Daerah Tingkat II yang sudah di atas angka rata-rata Jawa Barat bahkan ada beberapa Daerah Tingkat II yang sudah melampaui target Nasional, tetapi ada juga Daerah Tingkat II yang masih di bawah angka rata-rata Jawa Barat.

Yang masih di bawah 50% ialah : Kabupaten Pandeglang (29,64%), Cianjur (37,00%), Lebak (37,62%) dan Kabupaten Ciamis (48,50%).

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1) Sekolah Negeri minded; 2) Lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal; 3) Kesadaran orang tua dalam bidang pendidikan masih a ; 4) Biaya pendidikan dianggap mahal; 5) Rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga yang mendorong pilihan anak bekerja; 6) Bagi mereka yang merasa telah mencapai kemandirian mendorong terjadinya kawin muda.

e. Angkatan Kerja

Laju pertumbuhan angkatan kerja relatif tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan situasi ekonomi yang cukup baik sehingga membuka peluang kesempatan kerja, sehingga penduduk usia kerja cenderung masuk ke pasar kerja dibandingkan masuk ke pendidikan. Jumlah angkatan kerja menurut Sensus Penduduk tahun 1980 sebanyak 8,67 juta orang sedangkan menurut Sensus tahun 1990 bertambah menjadi sebanyak 13,13 orang. Sedangkan jumlah pekerja menjadi sebanyak 12,72 juta orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 433 ribu orang, dengan laju pertumbuhan angkatan kerja di atas 4 % per tahun.

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa beban penyediaan kesempatan kerja bagi Jawa Barat cukup berat. Selama sepuluh tahun angkatan kerja di Jawa Barat bertambah sebanyak 4,46 juta atau sekitar 446 ribu angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja setiap tahunnya.

Dilihat dari pendidikannya ternyata bahwa sekitar 1,49 juta angkatan kerja yang tidak/belum pernah sekolah atau sekitar 11 %. Dibandingkan dengan angka nasional

yang besarnya 15 % maka tingkat pendidikan angkatan kerja di Jawa Barat untuk tahun 1990 relatif lebih baik.

Sedangkan untuk angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD angka Jawa Barat lebih tinggi dari angka Nasional, walaupun perbedaannya tidak begitu besar. Angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD di Jawa Barat tercatat sebanyak 27% sedangkan di Nasional sebanyak 26%. Untuk angkatan kerja yang berpendidikan, artinya tamat SD s/d Universitas di Jawa Barat tercatat sebanyak 62% sedangkan angka nasional berada di bawah Jawa Barat yaitu sebanyak 59%. Dengan demikian ternyata bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Jawa Barat lebih baik dari nasional.

Masalah yang dirasakan tidak hanya laju pertumbuhan yang pesat tapi juga kesesuaian dengan pasar kerja, artinya terdapat peluang kesempatan kerja tetapi belum terinformasikan secara baik kepada yang membutuhkannya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pasar kerja yang belum berdaya guna dan berhasilguna. Disamping itu data ketenaga kerjaan pada tingkat makro Jawa Barat belum bisa dijabarkan untuk setiap Dati II. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya data ketenaga kerjaan di Dati II.

BAB 111  
KERJASAMA PEMDA PROPINSI DATI I JAWA BARAT  
DENGAN PERGURUAN TINGGI DAN PROSPEKNYA

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Jawa Barat adalah Propinsi yang memiliki Perguruan Tinggi paling banyak dibandingkan dengan Propinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah Jawa Barat memanfaatkannya melalui kerjasama dalam berbagai bentuk.

A. Kerjasama yang telah dilaksanakan.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebenarnya telah terjalin cukup i yaitu sejak tahun 1972 sewaktu didirikannya Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEMDA) yang sejak diberlakukannya KEPPRES Nomor 27 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.185 tahun 1990 telah dirubah namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pada waktu itu dosen dari ITB dan UNPAD banyak yang diminta bantuannya untuk menjadi staff ahli BAPPEDA dan memberikan hasil pemikirannya dalam penyusunan rencana pembangunan Jawa Barat.

Bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain Pemda Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Bantuan para tenaga ahli.

Salah satu contoh bentuk kerjasama dengan cara ini yaitu pada awal pendirian BAPPEDA (waktu itu namanya masih BAPPEMDA) dimana para 'pakar dari ITB dan UNPAD ditarik menjadi staf ahli BAPPEMDA, tugasnya yaitu memberikan

saran/hasil pemikiran, baik pada waktu penyusunan perencanaan pembangunan seperti Repelita, RUPTD maupun pekerjaan lain yang memerlukan pertimbangan inter disiplin ilmu. Sejak tahun 1990 pembentukan Kelompok Ahli telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Maret 1990 Nomor 061.SK.266-Bapp/90 tentang Pembentukan Kelompok Ahli BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Barat.

Para anggota Kelompok Ahli tersebut tersebut berjumlah 53 orang yang sebagian besar berasal dari Perguruan Tinggi yaitu UNPAD, ITB, IPB, UNPAR dan IAIN serta dari organisasi profesi atau lembaga lain seperti MUI, KODAM dan POLDA.

## 2. Kesepakatan Kerjasama.

Untuk melancarkan pelaksanaan kerjasama antara Pemda Jawa Barat dengan pihak lain, maka telah dibuatkan kesepakatan kerjasama yaitu :

- a. Kesepakatan kerjasama antara Pemda Jawa Barat dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa Perguruan Tinggi.

Kesepakatan tersebut dikenal sebagai Jaringan Informasi Hasil Penelitian (JARLIT), ditanda-tangani oleh : Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikbud, BAPPEDA Jawa Barat, Kepala Kanwil Depdikbud Jawa Barat, Kepala Kanwil Departemen Agama Jawa Barat, Kepala LAN Perwakilan Jawa Barat, Para Rektor dari : ITB, UNPAD, IKIP, IKOPIN, IPB, ITT, dan IAIN.

Kesepakatan yang dicapai antara lain menyebar-luaskan informasi hasil penelitian dari Instansi penanda-tangan kepada masing-masing anggota yang lain.

Kesepakatan tersebut ditanda-tangani pada tanggal 10 Oktober 1988.

b. Kesepakatan Kerjasama Pemasyarakatan dan Penerapan Riset dan Teknologi Tepat Guna di Propinsi Dati I Jawa Barat yang telah ditanda-tangani pada tanggal 5 Juni 1990 antarel Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan beberapa Instansi, penandatngannya adalah Menteri Riset dan Teknologi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat, Direktur Jenderal Pembangunan Desa Depdagri, Kepala Badan Litbang Depdagri, Ketua LIPI, Deputy Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan BPPT, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Dept. Perindustrian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PU Departemen PU, Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film, Ketua KAD N Jawa Barat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

### 3. Kerjasama Penelitian.

Kerjasama dalam bentuk ini lebih merupakan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh APBD Tingkat I.

Sang menjadi mitra kerja Pemda Jawa Barat adalah Lembaga Penelitian atau Lembacja Pengabdian Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat seperti : LPM UNPAD, ITB, IPB, IAIN, IKIP dan IKOPIN.

Obyek penelitian meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya maupun aspek-aspek lainnya.

### B. Prospek Kerjasama Pemda Propinsi Dati I Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi.

Pada PJPT II yang akan datang masalah yang dihadapi oleh Pemda Jawa Barat masih cukup banyak dan tampaknya memerlukan penelitian dan pemikiran yang lebih mendalam. Oleh

karena kemampuan dari aparaturnya yang terbatas, maka dengan sendirinya bantuan kerjasama dari Pihak Perguruan Tinggi masih tetap dibutuhkan. Kerjasama itu bisa berupa bantuan tenaga ahli seperti dalam bentuk kelompok ahli seperti yang sekarang sedang berjalan, atau dalam bentuk kerjasama penelitian untuk meneliti dan mengembangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan.

Salah satu aspek yang perlu mendapat pengembangan yaitu Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti yang menjadi tujuan pembangunan selama ini.

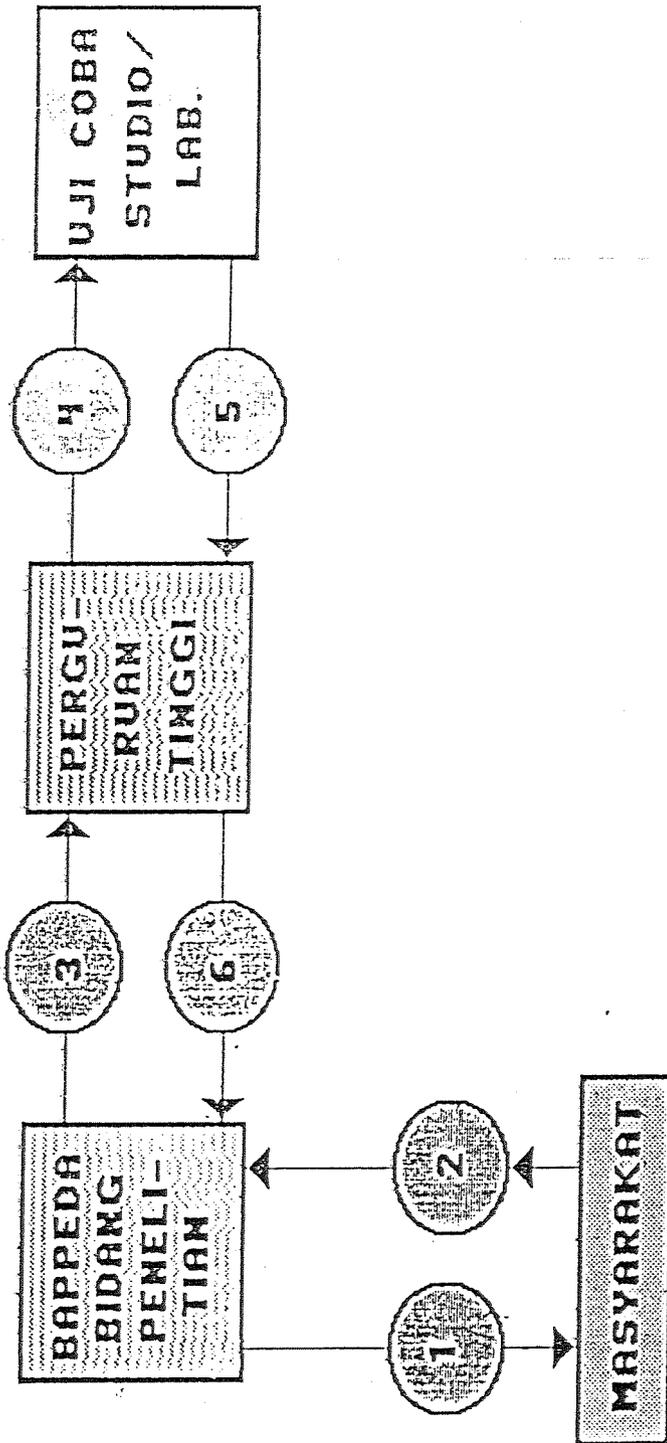
Pada proses pertumbuhan ekonomi berintikan pada kegiatan transformasi sumber alam menjadi produk bernilai ekonomi, teknologi berfungsi sebagai transformator dan generator nilai tambah. Teknologi memungkinkan untuk memanfaatkan berbagai sumber alam yang tersedia dan teknologi juga memungkinkan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satu upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Kerangka kerja TTG di desain untuk mengoptimalkan hasil rekayasa prototipe-prototipe TTG yang di desain dan dibuat oleh Perguruan Tinggi untuk diuji coba di lapangan serta diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kerangka kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pola Penelitian TTG
- b. Pola Uji Coba Langsung
- c. Pola Pengembangan.
- d. Pola Penerapan dan Penyebaran TTG.

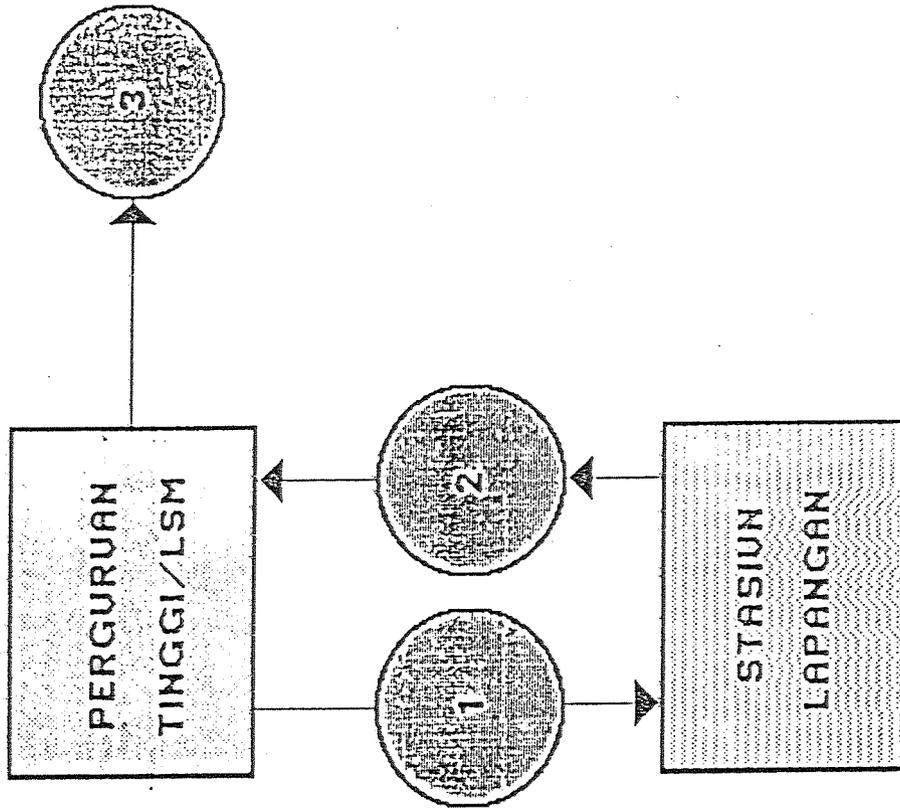
# 1. POLA PENELITIAN ITG



Keterangan :

1. STUDY POTENSI & KEBUTUHAN ITG
2. IDENTIFIKASI POTENSI & KEBUTUHAN ITG
3. KEBUTUHAN ITG
4. DESAIN/MODIFIKASI ITG
5. ITG HASIL UJI COBA STUDIO/LAB.
6. ITG.

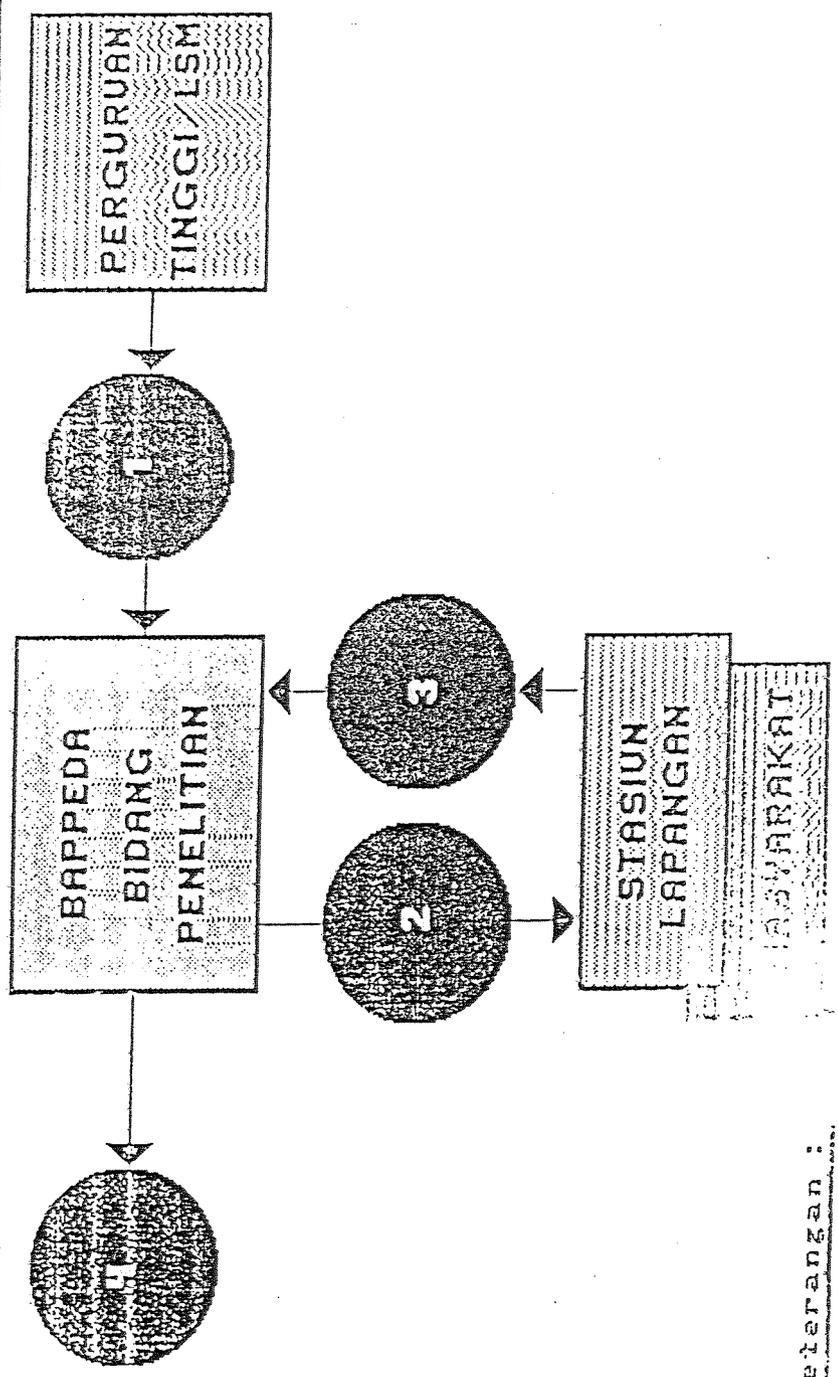
## 2. POLA UJI COBA LANGSUNG



Keterangan :

1. UJI COBA TTG
2. HASIL UJI COBA LAPANGAN.
3. TTG LAYAK TEKMIS

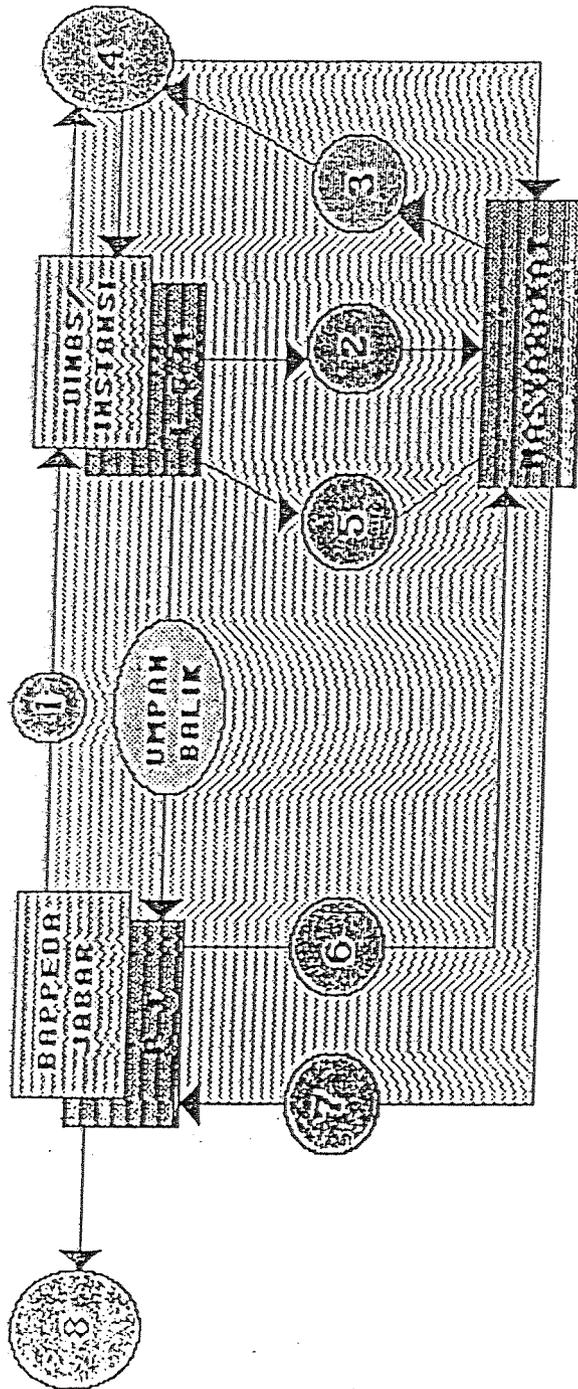
### 3. POLA PENGEMBANGAN



Keterangan :

1. TTS LAYAN TERKIN
2. PENGEMBANGAN SUMBAH USAHA LOKAL
3. IIG SOSIAL EKORON
4. TTS LAYAN PEMEROPAN/PENYEBARAN.

# 4. POLA PENERAPAN DAN PENYEBARAN TIG



1. BOPPEDA KOORDINASI DGM DINAS/INSTANSI TERKAIT & LSM TENTANG ADANYA TIG YANG SUDAH DIUJI & LAYAK SECARA TEKHIS & EKONOMIS.
2. DINAS INSTANSI & LSM MENGIDENTIFIKASI TARGET GROUP YANG PUNYA BAKAT (TALENS SCOTING)
3. DAFTAR TARGET GROUP
4. LATIHAN TIG
5. DINAS INSTANSI MENGADAKAN Bimbingan dan penyuluhan terhadap target group dan masyarakat selama +/- 3 bulan setelah latihan.
6. BAPPEDA JAWA BARAT SETELAH 1 TAHUN PELATIHAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP HASIL PENERAPAN DI MASYARAKAT.
7. UMPAN BALIK HASIL EVALUASI
8. REFORMULASI KAJIAN TIG

BAB IV  
K E S I M P U L A N

Dari urainn di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan telaahan, pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat selama PJPT I telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan, baik di bidang ekonomi maupun dibidang sosial budaya.
2. Sekalipun telah banyak hal-hal yang telah dicapai, tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, misalnya masalah Sumber Daya Manusia, Ketenagakerjaan maupun disparitas pertumbuhan antar wilayah.
3. Untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan, telah dilakukan penelitian-penelitian baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan fihak ke tiga seperti Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat.
4. Pemanfaatan potensi sumber daya manusia seperti para pakar di Perguruan Tinggi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui pembentukan kelompok ahli yang anggotanya terdiri dari para pakar dari beberapa Perguruan Tinggi maupun Instansi/Lembaga atau organisasi profesi yang ada.
5. Bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi pada PJPT II mendatany masih tetap diperlukan dan bahkan dikembangkan antara lain dalam :
  - a. Pengembangan Suinber Daya Manusia
  - b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.